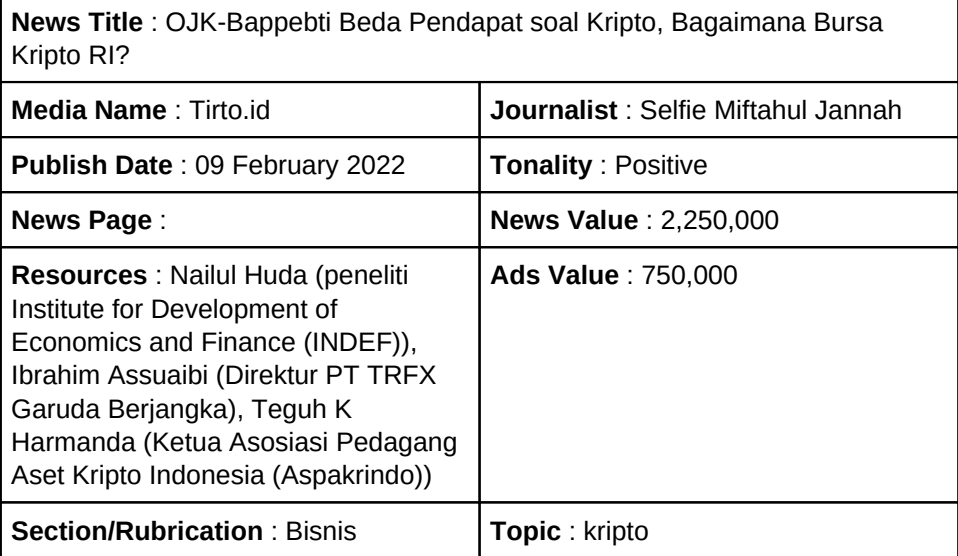




OJK-Bappebti Beda Pendapat soal Kripto, Bagaimana Bursa Kripto RI?

Representasi dari Bitcoin dan etereum yang juga sebagai simbol dasar keuangan Cina saat pemerintah mengumumkan Senin (27/06/2022) via/IMA FOTOFEST/Unesco Indonesia

Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram

Catatan: Sifatnya Hipotesis Jangka - 9 Februari 2022

OJK sedang berproses memfasilitasi transaksi kripto berbeda sikap dengan Bappebti.

Intisari - Pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelarangan pihak perbankan memfasilitasi transaksi kripto menuai kritik. Pemasukan, kripto telah dijadikan sebagai salah satu komoditas yang diperdagangkan dengan pengawasan di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

OJK telah meminta kepada industri perbankan agar penggunaan rekening bank tidak dijadikan sebagai penampung dana dari kegiatan melanggar hukum, termasuk kripto. Hal itu merupakan bentuk dari maraknya penipuan investasi dan kejutan bermodus skema ponzi.

Mengenal hal tersebut, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (IDeFE), Nalid Hada, menilai pernyataan OJK itu merendahkan adanya ketidaksihonestan antar instansi pemerintah. Pemasukan, kripto sendiri telah diramalkan sebagai komoditas investasi oleh Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan.

Tidak hanya itu, Bappebti juga telah merancang aturan terkait perdagangan dan pedagang kripto secara resmi. Artinya, selama transaksi dilakukan oleh pedagang kripto terdaftar dan diawasi Bappebti, semua perdagangan kripto layak sebagai komoditas ataupun produk derivatif lainnya.

"Di satu sisi, Bappebti berupaya memfasilitasi industri ini, tapi di sisi lain ada institusi lain yang punya pandangan lain. OJK dan Bappebti ini seperti diadu-dudai, tren aset kripto ini kan sudah jalan beberapa tahun terakhir," ungkap Nalid dalam keterangannya Rabu (9/2/2022).

Ia menjelaskan, di sisi lain, ia memahami sudut pandang OJK yang masih mempersepsikan bahwa aset kripto berpotensi sebagai alat tukar layaknya uang fiat, karena namanya adalah *cryptocurrency*. Sedangkan alat tukar resmi adalah rupiah sebagaimana diatur perundang-undangan.

"Tapi kan sejak awal ketika Bappebti memfasilitasinya, kesempatan di Indonesia hanya boleh digunakan sebagai aset investasi. Bukan alat transaksi," terangnya.

Karena itu, ia menilai ada kejanggalan dengan imbauan dari otoritas agar perbankan tidak memfasilitasi transaksi aset kripto, padahal sejak awal Bappebti menumuskan kripto sebagai komoditas investasi.

"Bagaimana bisa investor membeli atau berinvestasi aset kripto kalau tidak bisa menggunakan rekening bank sebagai jembatan untuk beli atau jual aset kripto ke pedagang kriptonya? Kan ini aset digital, masa jadi beli dan jualnya lewat pedagang langsung secara offline," jelas dia.

Lebih jauh, dia sempat bahwa otoritas dan Satgas Waspada Investasi (SWI) belum melarang siapa perdagangan itu bersifat legal, termasuk layanah oleh pedagang kripto yang tidak terdaftar.

"Setelah ini, Bappebti sudah memilih mau jadi pedagang kripto dan koain kripto yang terdaftar dan berizin resmi di Bappebti. Selanjutnya itu sudah ini cukup jadi acuan untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan ketertarikan bank," jelas dia.

Ia menambahkan bahwa OJK berhak dan berwenang mengatur dan melarang perbankan dalam eksistensi aset kripto, dalam hal pengawasan atau bank ke dalam membeli aset kripto. Karena dana di bank adalah dana masyarakat.

"Mereka tidak boleh main-main mempunyai dana risibahnya, terutama di aset yang punya fluktuasi tinggi," terangnya.

Sementara itu, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Asosiasi, mengungkapkan adanya gesekan dengan OJK akan berdampak pada adanya peluncuran bursa kripto. Sebab, fungsi lembaga keuangan, dalam hal ini bank, nantinya akan sebagai kustodian untuk perdagangan aset kripto. Kustodian ini paling penting posisinya.

"Tadi saya tidak heran kenapa launching bursa kripto ini motor terus dari semester II/2021 lalu, rupanya ada deadlock antara Bappebti dan OJK dalam melaksanakan perdagangan aset kripto yang diakui negara, dalam hal ini bursa kripto," ungkap Ibrahim.

Dengan kendala itu akan membuat dampak lanjutan seperti kan sulitnya aset kripto diterima di masyarakat.

"Bahkan akan makin berjamuran aktivitas perdagangan kripto yang sulit dipantau kemana-mana. Negara makin sulit untuk mengupai aset kripto ini," ungkap Ibrahim.

Sedangkan Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakind), Teguh K. Hamanda, mengungkapkan pihak asosiasi menghargai pernyataan dari otoritas. Namun, menurutnya, sejauh ini asosiasi telah berupaya untuk menempatkan perdagangan kripto sesuai aturan main dan melengkapi perlindungan hukum.

"Bahkan sudah semestinya kita harus menjadi industri agar tumbuh secara sehat, contohnya pada industri aset kripto yang sudah menerapkan rekomendasi terhadap ANPR, adanya pelaporan yang diwajibkan oleh Bappebti setiap harinya, dan melaporkan jika menemukan transaksi mencurigakan. Sehingga akan yakin sekali, bahwa transaksi aset kripto yang berjalan saat ini sudah selama dengan mitigasi risiko yang kita khawatirkan bersama pada industri keuangan secara luas," tandas dia.